



NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 23 September 2023
KATEGORI : Hukum Administrasi Negara

Para Pj Kepala Daerah Dievaluasi Tiap 3 Bulan, Diberhentikan jika Jeblok

Sambungan dari hal 1

"Disiapne batik sama baju nasionalnya. Sing penting jaga kesehatan karena banyak acara," kata Didik sambil memegang ponsel.

Saat ditemui *Jawa Pos* di Surabaya, pria yang pernah dipilih sebagai Plh bupati Mojokerto itu mengaku sangat sibuk. "Kami sedang mempersiapkan pelantikan 13 penjabat (Pj) bupati dan wali kota," tambah Didik.

Surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pj kepala daerah rencananya memang baru diserahkan hari ini (23/9) di Jakarta. Namun, 13 orang yang telah terpilih sebagai Pj 13 bupati/wali kota di Jatim sudah jelas. Selain dari internal pemkab, ada pula pejabat eselon II di Pemprov Jatim, Kemen-

dagri, serta Kemenkeu (*selengkapnya lihat grafis*).

Informasi soal penunjukan sebagai kepala daerah sementara sudah disampaikan kepada calon terpilih. Hari ini (23/9) sebanyak 12 Pj kepala daerah (minus Pj bupati Tulungagung) diundang ke Kemendagri untuk mendapatkan pengarahan. Lalu, pada malam yang sama, mereka mengikuti gladi bersih pelantikan di Gedung Negara Grahadi.

Khusus Pj bupati Tulungagung, dia baru diundang ke Kemendagri pada Minggu (24/9). Malamnya ikut gladi bersih, lalu menjalani pelantikan pada Senin (25/9) di Grahadi.

Para Pj, lanjut Didik, akan menjabat lebih dari setahun. "Sampai bupati definitif terpilih," kata Didik.

Dia menyebut hak dan kewenangan Pj sama dengan kepala daerah definitif. Termasuk tunjangannya.

Adapun soal kewenangan, Pj bupati/wali kota bisa memimpin proses penganggaran. Terutama pada APBD tahun 2025. Mereka juga bisa melakukan mutasi dan pengangkatan ASN.

Didik menjelaskan bahwa tetap ada evaluasi untuk para Pj kepala daerah. Evaluasi digelar tiga bulan sekali. Mereka bisa saja diberhentikan jika kinerjanya jeblok.

Khusus untuk kepala OPD yang menjabat bupati, Didik mengatakan bahwa standar prosedur operasionalnya jelas. Mereka tetap memimpin instansinya. Kepala OPD yang dobel jabatan dituntut untuk bisa membagi waktu secara benar. **(hen/c6/ttg)**